



**PERANAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM
DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA
PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI:
29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

NAMA : Raihan Wibowo

NIM : 1910611127

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023



LEMBAR PERSETUJUAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI- ILMU HUKUM

JUDUL:

PERANAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM
DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA
PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI:
29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST)

RAIHAN WIBOWO
1910611127

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Program Studi S1 - Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 28 Desember 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi SI Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
NIP. 198701022019031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Handoyo Prasetyo SH MII
NIDN: 0019126303



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama:	Raihan Wibowo
NPM:	1910611127
Program Studi:	S1 -Ilmu Hukum
Judul:	Peranan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Dalam Penerapan Hukum Acara Pidana Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Beniharmoni Harefa S.H.,
LL.M.
Ketua

Prof. Dr. Bambang
Waluyo,SH,MH
Anggota 1

Dr. Handoyo Prasetyo S.H., M.H
Anggota 2

Dr. Abdul Halim M., Ag
Dekan

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
Kaprosdi

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal Ujian: 5 Januari 2023

BIODATA PENULIS



Nama : Raihan Wibowo

Tempat/Tgl. Lahir : Depok, 25 Januari 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Depok

No. Telpon : 081932101520

Email : raihanwibowo101@gmail.com

Nama Orang Tua

a. Ayah : -

b. Ibu : -

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Pondokcina 5 Depok

2. SMP : SMPN 1 Depok

3. SMA : SMA Tugu Ibu 1 Depok

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Jumlah SKS Lulus : 143

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Wakil Ketua FRDM (2021-2022)
2. Staff Edukasi Masyarakat GenBI Jakarta (2022)
3. Wakil Koordinator Divisi Debat FRDM (2020-2021)
4. Kampus Mengajar UPNVJ (2021)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulsi pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntutu berdasarkan hukum yang berlaku

Nama: Raihan Wibowo

NIM: 1910611127

Tanggal: 28 Desember 2022

Tanda Tangan:



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Raihan Wibowo

NIM: 1910811127

Fakultas: Hukum

Program Studi: S1- Ilmu Hukum

Jenis Karya: Skripsi

Judul: Peranan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Dalam Penerapan Hukum Acara Pidana Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst).

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan submit naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 28 Desember 2022

Yang menyatakan


Raihan Wibowo

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya, akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk skripsi. Sejatinya, menyelesaikan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis memberikan apresiasi dan ucapan hangat terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut berkontribusi pada penyelesaian tugas akhir ini. Adapun dalam kesempatan ini, penulis berikan rasa hormat kepada:

1. Kedua orangtua penulis yakni Adi Wahyu Wibowo dan Dian Malahayati yang tak pernah henti memberikan kasih dan sayangnnya kepada putranya tercinta sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Dr. Abdul Halim M., Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta..
3. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo S.H ., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan kepada penulis sehingga tetap tangguh dalam menuntaskan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah membantu penulis.
5. Pihak Komisi Yudisial yang telah membantu memberikan data yang dibutuhkan sehingga penulis dapat lancar hingga akhir.
6. Keluarga Besar Wahyu dan Rumnur yang telah memberikan dukungan secara positif kepada penulis.
7. Keluarga Besar Forum Riset dan Debat Mahasiswa (FRDM) 2022 terkhusus kepada Angeline Monica, Nadia Wulandari, Ni Wayan Widya, Roki Arnanda Saputra, Fadriyatun, Fachri Fadillah, Fatihana, Adella, Daeli, Diajeng Dhea dan yang lainnya.
8. Rekan-rekan berpikir penulis kepada Roki Arnanda Saputra, Deviana Cahya, Yosephine Patricia, Bryan DWT Simalango, dan yang lainnya.
9. Rekan-rekan penulis yang memberikan motivasi sejak awal perkuliahan yakni Zahrani Salsabila, Muhammad Fadillah Ulhad,

Muhammad Ardan Royanto, Try Mulyaningsih, Nadya Ariska, Tsabitha Afnan, Maria Amelia, M. Sulthan AG , Faiz Emery, Nabila Els dan yang lainnya.

10. Rekan-rekan GenBI Jakarta terkhususnya adalah Departemen Edumas Jakarta, Iqbal Satrya, Yura Marzani, Sintia, Elsha Widya dan yang lainnya tanpa mengurangi rasa kasih sayang tidak bisa disebut satu per satu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, dapat dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT kepada rekan-rekan semua

Adapun penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun sehingga dapat disempurnakan dan memberikan manfaat kepada banyak insan di dunia.

Jakarta, 28 Desember 2022



Raihan Wibowo

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa yang memiliki dampak besar bagi masyarakat karena adanya penyalahgunaan keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dengan Terpidana eks Menteri Sosial Juliari Batubara, Hakim menolak permohonan para pemohon yakni masyarakat yang merasa dirugikan karena kasus korupsi bantuan sosial untuk dilakukannya penggabungan ganti kerugian. Hakim dalam pertimbangannya tidak menerima permohonan karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi relatif untuk mengadili perkara terkait ganti kerugian tersebut. Para Pemohon yang dirugikan dari putusan hakim tersebut melaporkan kepada Komisi Yudisial terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik tentang Ketidaktepatan penerapan hukum acara yang dilakukan oleh Hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran Komisi Yudisial dalam mengawasi dan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menolak penggabungan ganti kerugian dalam studi kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji studi literatur tentang hukum acara dalam penggabungan ganti kerugian, Kode Etik dan Perdoman Perilaku Hakim (KEPPH) Komisi Yudisial, dan dilakukannya pengambilan data dari hasil pemeriksaan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran kode etik berkaitan dengan profesionalitas hakim.

Kata Kunci: Penggabungan Perkara gugatan ganti kerugian, Komisi Yudisial, Peningkatan Kapasitas Hakim

Abstract

Criminal corruption is a major crime that has a major impact on society as a result of the abuse of public finances that should be used to bring social good health. In a case study ruling on corruption crimes: 29/ pid. sus-tpk /2021/ pk. JKT. The judge in consideration did not accept the application because the central Jakarta court lacked competence and relative authority to prosecute the case. The wronged applicants of the judge's ruling reported to the judicial commission on the alleged violation of the code of ethics regarding the infrequent application of the law of the event by the judge. The purpose of this study is to see the role of the judicial commission in monitoring and examining the alleged breach of the code of ethics by the central Jakarta state court judge in refusing incorporation for damages in the case study. The method of research used was a normative legal approach by reviewing literature studies on the law of the program in conjunction with the judiciary restitution, ethics, and ethics of the judge's (kepph) judicial committee (head of the judicial justice), and by taking data from the audit by the judiciary judge central Jakarta on the case. The result said that there has been a breach of the code of conduct relating to the judge's professional integrity.integrity.

Keywords: Compensation claim, judiciary commission, increased judge capacity

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
Abstract	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah:.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Pustaka (Literature Review)	12
B. Kerangka Konseptual	14
C. Kerangka Teori.....	33
BAB III	38
HASIL TEMUAN.....	38
A. Mekanisme Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.....	38
B. Batasan Perilaku Hakim dengan Pertimbangan Hakim	46
C. Hasil Wawancara dengan Pihak Komisi Yudisial.....	47
D. Konseptual Penyimpangan Hukum Acara Pidana Merupakan Pelanggaran Kode Etik Hakim.....	49

E. Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi	51
F. Kewenangan Komisi Yudisial di Berbagai Negara	52
BAB IV	57
PEMBAHASAN	57
A. Peran Komisi Yudisial Terhadap Hakim dalam Penerapan Hukum Acara Pidana Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)	57
B. Penguatan Kapasitas Hakim oleh Komisi Yudisial Dalam Rangka Mewujudkan Profesionalitas Hakim	71
BAB V	76
PENUTUP	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA	78
Lampiran	83
1. Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir	83
2. Bukti Cek Turnitin	84
3. Berita Acara Hasil Ujian	85

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Jenis Sanksi Kode Etik Hakim

Tabel 3.2: Hasil Wawancara

Tabel 4.1: Jenis Sanksi Kode Etik Hakim

Tabel 4.2: Pelaksanaan PKH tahun 2021

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Alur Proses Penanganan Masyarakat

Gambar 3.2: Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat 2021

Gambar 3.3: Hasil Verifikasi Penerimaan Laporan Masyarakat 2021

Gambar 3.4: Rekapitulasi Hasil Sidang Panel 2021

Gambar 3.5: Rekapitulasi Hasil Sidang Pleno 2021

Gambar 3.6: Rekapitulasi Usulan Penjatuhan Sanksi 2021

Gambar 3.7: Penjatuhan Sanksi Berat